

UPAYA PEMERINTAH MENSTABILKAN MATA UANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Nawiyah¹, Marsha Aprilia^{2*}, Nabila Salma Febriningrum³, Natasha Jihanisa⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT Politeknik APP Jakarta

Corresponding Author: marshaapriliaasha@gmail.com^{2*}

Article History

Received : 03-12-2023

Revised : 15-12-2023

Accepted : 20-12-2023

Kata Kunci: Ekspor; Impor; Mata Uang; Pemerintah; Perdagangan Internasional

Keywords: Currency; Export; Government; Import; International Trade

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang berbagai Upaya Pemerintah untuk mengambil suatu Upaya keputusan dalam menjaga ke-stabilitas mata uang rupiah Indonesia dalam konteks dalam Perdagangan Internasional. Melalui sebuah analisis kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan untuk volatilitas pada pasar global, Dengan menggunakan suatu Kebijakan Ekonomi dan Keuangan untuk menilai langkah nyata pemerintah dalam mengatasi potensi pada devaluasi rupiah dan dengan meningkatkan kredibilitas mata uang nasional di pasar dunia. Dengan adanya Faktor-faktor seperti kebijakan fiskal, cadangan devisa, dan reformasi struktural yang diperiksa untuk mengetahui akan dampaknya terhadap stabilitas keuangan. Hal ini memberikan sebuah wawasan mengenai dinamika perekonomian Indonesia dalam konteks perdagangan internasional baik Ekspor maupun Impor dan dampaknya terhadap stabilitas mata uang regional dengan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai inisiatif pemerintah. dengan penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi nilai tukar Rupiah, serta dampak Ekspor-Impor. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih untuk efektivitas kebijakan pemerintah dalam Upaya menjaga menstabilkan mata uang Rupiah atau mata uang Nasional dalam Perdagangan Internasional dan memberikan pengambilan kebijakan dalam menghadapi pasar global yang terus berkembang dalam perekonomian yang global.

ABSTRACT

This study analyzes the government's efforts to take a decision in maintaining the stability of the Indonesian rupiah in the context of international trade. Through an analysis of monetary and fiscal policies applied to volatility in global markets, using an economic and financial policy to assess the government's real steps in overcoming the potential for rupiah devaluation and by increasing the credibility of the national currency in the world market. Factors such as fiscal policy, foreign exchange reserves, and structural reforms are examined to determine their impact on financial stability. This provides an insight into the dynamics of the Indonesian

economy in the context of international trade both Exports and Imports and their impact on regional currency stability by providing a deeper understanding of government initiatives. With this research can identify internal and external factors that can affect the Rupiah exchange rate, as well as the impact of Export-Import. The results of this analysis are expected to provide more understanding for the effectiveness of government policies in an effort to maintain stabilizing the Rupiah or National currency in International Trade and provide policy making in the face of an ever-evolving global market in a global economy.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memiliki peranan yang signifikan bagi suatu negara, terutama di Indonesia, dengan sejumlah manfaat yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung melibatkan produksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan produksi negara lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan produksi. Manfaat tidak langsung mencakup pertukaran barang dengan produk luar negeri yang memiliki pertumbuhan pesat, mendukung pertumbuhan ide, bakat, dan keterampilan, serta memberikan dasar untuk perolehan modal pinjaman. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang ataupun jasa dan menjadi subjek ekonomi suatu negara terhadap subjek ekonomi negara lainnya, meliputi individu, perusahaan ekspor dan impor, perusahaan industri, dan lembaga pemerintah yang muncul dalam neraca perdagangan ekonomi. Perekonomian yang aktif dalam perdagangan internasional disebut sebagai perekonomian terbuka. Dalam konteks ini, perdagangan internasional mencakup kegiatan ekspor juga impor. Penting untuk dicatat bahwa titik pijakan perdagangan internasional terletak pada perbandingan antara ekspor dan impor terhadap pendapatan nasional. Ketika rasio ekspor-impor lebih tinggi terhadap pendapatan nasional, perekonomian dianggap lebih terbuka.

Sejak tahun 1980 an, banyak negara di dunia telah mendapatkan dampak positif dari pertumbuhan industri keuangan yang pesat berkat kemajuan liberalisasi keuangan. Namun, pada saat yang sama, negara-negara tersebut juga mengalami masa-masa perlambatan pertumbuhan ekonomi yang drastis, akibat beban ekonomi yang besar akibat ketidakstabilan keuangan atau krisis keuangan. Dengan latar belakang ini, banyak negara mulai memberikan penekanan besar pada stabilitas keuangan ketika menerapkan kebijakan mereka. Perhatian terhadap stabilitas keuangan semakin meningkat seiring dengan munculnya faktor-faktor baru yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keuangan, termasuk penguatan hubungan sektor keuangan antar negara dan maraknya pengembangan instrumen keuangan yang kompleks.

Stabilitas mata uang dan kestabilan ekonomi adalah dua hal yang berkaitan erat. Ketika mata uang stabil, harga barang dan jasa cenderung stabil juga. Ini memungkinkan produsen

untuk merencanakan produksi mereka dengan lebih baik dan mencegah fluktuasi harga yang dapat merugikan pihak konsumen. Harga stabil akan menyebabkan inflasi lebih terkendali sehingga kondisi makro ekonomi sebuah negara akan lebih baik. Laju inflasi juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri dan nilai tukar rupiah. Selain itu, sistem keuangan yang efektif dan efisien juga mampu mengatasi perubahan dalam negeri dan internasional. Untuk menjaga stabilitas perekonomian, stabilitas sistem keuangan sangat penting karena memungkinkan fungsi intermediasi dan layanan keuangan lainnya bekerja secara optimal untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas keuangan merupakan persyaratan penting tidak hanya untuk stabilitas harga, yang merupakan tujuan kebijakan bank sentral, tetapi juga untuk pembangunan perekonomian yang sehat. Hal ini karena ketidakstabilan keuangan menimbulkan biaya yang besar bagi perekonomian, karena volatilitas variabel harga di pasar keuangan meningkat dan lembaga atau perusahaan keuangan dapat bangkrut. Selain itu, pembangunan ekonomi dapat dibatasi pada saat seperti ini, karena pelaku ekonomi mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang rasional dan efisiensi alokasi sumber daya menjadi berkurang.

Pada dasarnya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal menstabilkan nilai mata uang dalam hal ekspor maupun impor tetapi tidak hanya pemerintah yang berupaya dalam hal ini, yang terlibat dalam upaya menstabilkan mata uang rupiah di perdagangan internasional banyak pihak salah satunya selain pemerintah adalah Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia dan pihak lain yang akan dijelaskan dalam penulisan ini. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menstabilkan nilai mata uang rupiah dalam perdagangan internasional khususnya pada ekspor saling berkaitan, bagaimana peran Bank Sentral Indonesia dan Bank Indonesia dalam menstabilkan mata uang rupiah dalam perdagangan internasional dan juga bagaimana dampak dari upaya pemerintah yang telah dilakukan tersebut dan bagaimana pemerintah tersebut mengatasi ketidakberhasilan dari upaya tersebut dan sejauh mana Bank Sentral Indonesia dan Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah dalam hal menstabilkan mata uang rupiah dalam kegiatan perdagangan internasional ini.

METODE PENELITIAN

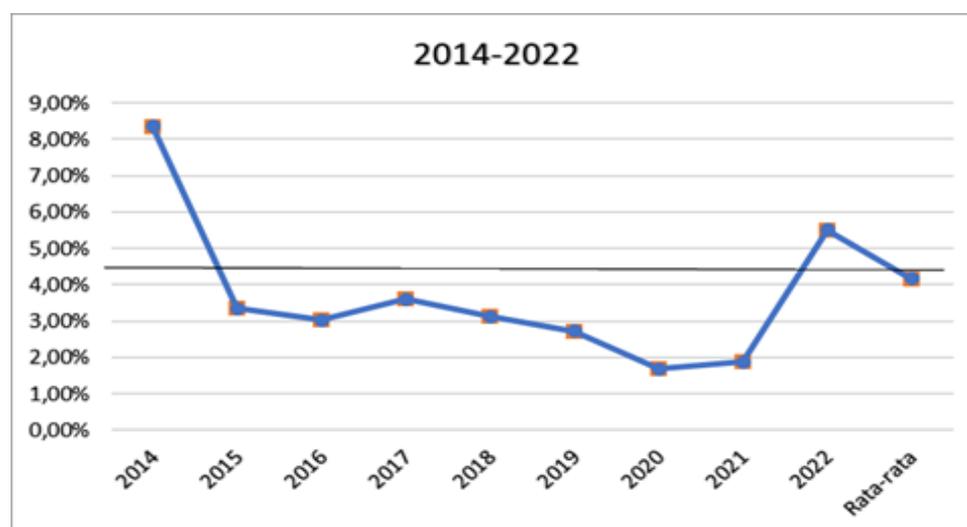
Jenis dari penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga menggunakan analisis deskriptif. Metode kuantitatif dalam penelitian biasanya dilakukan untuk menguji keabsahan teori atau hipotesis sehingga bisa digunakan untuk memperkuat suatu teori ataupun menolak teori tersebut. Lalu analisis deskriptif sendiri digunakan untuk menjelaskan indikasi masalah yang terjadi pada saat ini. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari beberapa sumber referensi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sifat dari penelitian yaitu deskriptif analisis, pada penelitian ini terdapat upaya Pemerintah untuk Menstabilkan Mata Uang Dalam Perdagangan Internasional. Deskriptif adalah penelitian untuk memberikan Upaya-upaya secara sistematis dan akurat. Dengan cara pemerintah berupaya untuk mengumpulkan data ekonomi, seperti nilai tukar mata uang, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan lainnya untuk menganalisis tren dan perubahan. Analisis Regresi Menggunakan analisis regresi untuk memahami hubungan antara berbagai faktor ekonomi dan stabilitas mata uang, seperti suku bunga, inflasi, dan faktor-faktor lainnya. Pemerintah Menyiapkan analisis.

Sumber penelitian kali ini menggunakan data sekunder, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, pertama ada data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, dan kedua, data yang berasal dari sumber-sumber pustaka terdahulu, seperti jurnal, buku, atau media cetak lainnya. Data sekunder ini mencakup berbagai materi pustaka, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, dan dokumen lainnya yang terkait dan relevan dengan fokus kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MATA UANG RUPIAH TERHADAP DOLAR TAHUN 2014-2022



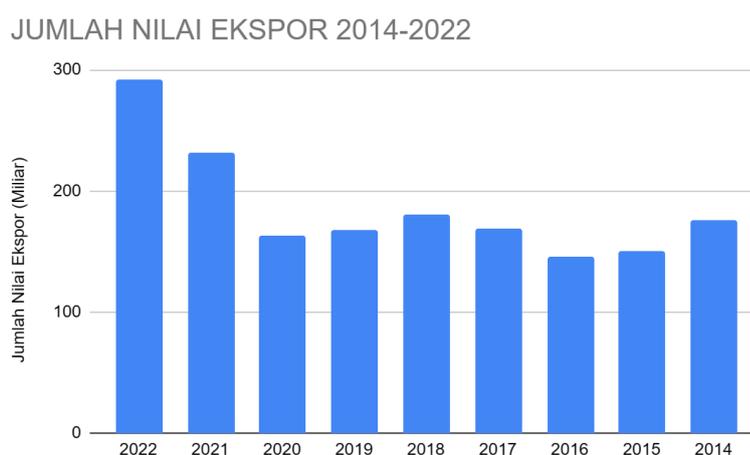
(Sumber: BI 2014-2022)

Rata- rata dalam 9 tahun 4,163%

Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral Republik Indonesia dan berperan penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas nilai tukar dan inflasi. Sebagai badan hukum yang independen, BI bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, mengelola nilai tukar, serta memantau dan mengatur aktivitas perbankan. Sebagai bank sentral, BI mempunyai kewenangan mengelola cadangan devisa negara dan dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing. Kebijakan moneter, seperti penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan intervensi valuta asing, merupakan alat

yang digunakan BI untuk mencapai tujuan tersebut. Dari data di atas, menunjukkan pada periode tahun 2014-2022, pada rata-rata inflasi tahunan Negara Indonesia selama 9 Tahun sebesar 4,16% per tahun. Dengan mengkalkulasi dengan Hilangnya nilai secara kumulatif setelah 10 tahun inflasi, nilai uang terakumulasi sebesar 49,99% (4,14% YoY). pada tahun 2014 mengalami kenaikan nilai mata uang sebesar 8,36% dengan akumulasi 1.174.406, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,35% akumulasi 1.213.748, tahun 2016 3,02% akumulasi 1.250.403, pada 2017 mengalami kenaikan mata uang sebesar 3,61% dengan akumulasi 1.295.543, tahun 2018 3,13% dengan akumulasi 1.336.094, tahun 2019 2,72% penurunan dengan akumulasi 1.372.435, tahun 2020 1,68% akumulasi 1.395.492, tahun 2021 semakin menurun dengan persentase 1,87% dengan total akumulasi 1.421.588, dan pada tahun 2022 naik sebesar 5,51% dengan total jumlah akumulasi sebesar 1.499.917. Dengan Rata-rata keseluruhan pada tahun 2014-2022 4,163%. Pada Inflasi tahunan umum dengan rata-rata kenaikan harga keseluruhan barang yang di survey oleh Badan Pusat statistic (BPS) dalam kurun satu tahun yang berkarakteristik pada rata-rata inflasi Pada secara umum, bahwa yang dapat dipahami dengan kenaikan biaya kurang dari rata-rata, dan peningkatan biaya cenderung lebih tinggi dari nilai ini.

NILAI EKSPOR DAN NILAI IMPOR INDONESIA



(Sumber: Badan Pusat Statistik 2014-2022)

Ekspor adalah salah satu kegiatan yang membantu perekonomian suatu negara, khususnya di negara kita yaitu Indonesia, menurut data statistik Indonesia menjelaskan jika kegiatan ekspor baik barang ataupun jasa ini menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah konsumsi privat dan sumbangan. Karena Setiap tahunnya pemerintah akan menetapkan target pertumbuhan ekspor dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, peran pemerintah sangat besar dalam menanggapi kegiatan ini begitu pula upaya-upaya yang dijalankan oleh keputusan pemerintah, seperti:

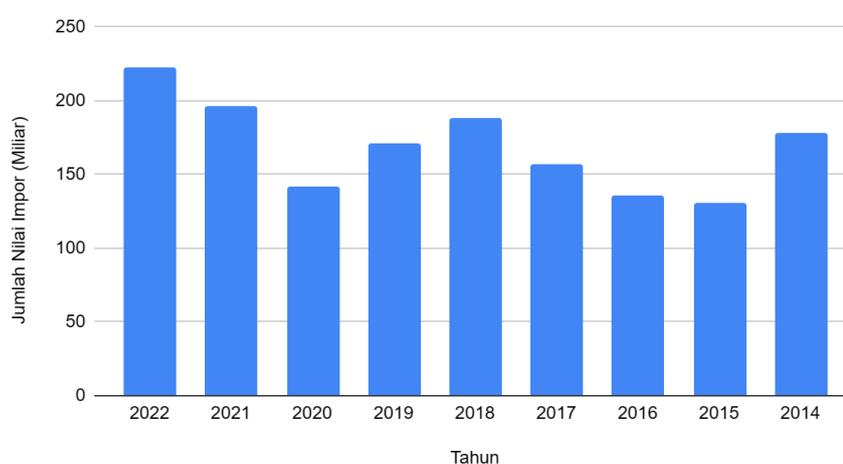
1. menentukan sektor komoditi terbaik yang akan di ekspor
2. membuat prosedur yang lebih sederhana untuk menekan biaya dan waktu dalam kegiatan ekspor dan impor

3. diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar bagi pasar nasional maupun internasional

Dari tiga cara tersebut, pemerintah telah mengatur ketentuan untuk meningkatkan ekspor secara singkat. Jika evaluasi target ekspor dapat dilakukan, langkah-langkah dapat dirancang untuk mengantisipasi, seperti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor Indonesia, yang merupakan langkah strategis. Terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini, yakni faktor domestik dan faktor pasar internasional. Faktor domestik melibatkan kapasitas produksi, harga di pasar domestik, dan berbagai kebijakan dalam negeri. Sementara itu, pasar internasional mencakup aspek seperti harga di pasar internasional, nilai tukar, dan permintaan dari negara-negara importir produk Indonesia.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014-2022 jumlah ekspor Indonesia mengalami fluktuasi. Peningkatan dan penurunan terus terjadi selama 9 tahun dari 175.979.986.988 di tahun 2014 hingga 291.904.299.995 di tahun 2022, namun nilai ekspor Indonesia sempat menurun pada tahun 2016 pada angka 145.186.211.247, menurut ahli ekonomi Ahmad Heri Firdaus, ekspor yang melemah ini karena permintaan pasar utama ekspor Indonesia seperti China dan Amerika Serikat mengalami keterlambatan. ekspor tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar 291.904.299.995. Permintaan kegiatan ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi dari perekonomian dunia. Maka dari itu faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor adalah harga ekspor, GDP per kapita, dan kurs nilai tukar riil.

JUMLAH NILAI IMPOR 2014-2022



(Sumber: Badan Pusat Statistik 2014-2022)

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor Indonesia pada 9 tahun terakhir nilai impor cenderung stabil atau tidak mengalami penurunan drastis maupun kenaikan yang drastis. Dapat diketahui juga bahwa nilai impor Indonesia mengalami kenaikan ataupun penurunan yang berbeda dari tahun ke tahun. Jumlah nilai impor Indonesia cenderung lebih kecil dibanding dengan jumlah nilai ekspor Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan baik karena suatu negara akan lebih baik banyak mengekspor daripada mengimpor. Dapat dikatakan baik karena ketika kita lebih banyak menjual suatu komoditas maka akan lebih baik daripada kita membeli suatu komoditas, begitupun dalam

ekspor dan impor. Komoditas impor terbesar di Indonesia yaitu terletak di sektor non migas, pada urutan pertama yaitu ada Mesin dan peralatan mekanis lalu disusul dengan Plastik dan barang dari plastik, Besi dan baja, Bahan kimia organik dan Kendaraan dan bagiannya.

Pada tahun 2015 nilai impor Indonesia mengalami penurunan sebesar 16,02% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2014. Penurunan terbesar berada pada sektor non migas yaitu golongan perhiasan atau permata sebesar 62,54%. Lalu nilai impor pada barang konsumsi, bahan baku atau penolong dan barang modal pada tahun 2015 juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,16%, 21,35% dan 15,56%. Penurunan nilai impor dikarenakan nilai dolar yang menguat sehingga membuat pasar lebih berekspektasi pada produk dalam negeri dan produk domestik memainkan peran lebih besar pada tahun ini sehingga ekspor pada tahun 2015 ini mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2016 nilai impor Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,82%. Penurunan terbesar pada tahun 2016 ini terletak pada golongan mesin dan peralatan listrik, sedangkan pada golongan perhiasan atau permata mengalami kenaikan pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 nilai impor juga mengalami kenaikan sebesar 17,83%, peningkatan ini terjadi di semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku atau penolong dan barang modal yaitu masing-masing 14,69%, 16,56% dan 12,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2016. Lalu pada tahun 2018 nilai impor Indonesia mengalami kenaikan, sama dengan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, peningkatan terjadi pada barang konsumsi, bahan baku atau penolong dan barang modal. Namun pada tahun 2019 dan 2020 nilai impor Indonesia mengalami penurunan, penurunan terbesar berada pada golongan yang sama yaitu barang konsumsi, bahan baku atau penolong dan barang modal. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai impor Indonesia mengalami kenaikan, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 47,93% dan peningkatan terbesar pada golongan barang konsumsi (37,73%), bahan baku atau penolong (42,80%) dan barang modal (20,77%). Pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan pada golongan yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa apabila nilai dolar menguat maka nilai impor akan menurun, karena jika nilai dolar menguat maka pasar lebih percaya dengan barang domestik. Begitupun sebaliknya peningkatan impor terjadi apabila permintaan pasar lebih banyak dari pada penawaran dalam negeri. Hal ini membuat permintaan pasar kekurangan dan memutuskan untuk mengimpor terus menerus.

UPAYA PEMERINTAH

Peran pemerintah dalam menstabilkan mata uang rupiah yaitu dengan dua kebijakan. Dua kebijakan ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Badan yang berwenang merumuskan kebijakan fiskal di Indonesia sendiri bernama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang perannya sendiri ialah perumus kebijakan fiskal serta sektor keuangan yang lingkup tugasnya sendiri yaitu ekonomi makro, pendapatan negara, dan kerja sama internasional. Sedangkan kebijakan moneter sendiri diatur oleh Bank Indonesia yang membantu pemerintah untuk berupaya menstabilkan mata uang rupiah, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah sendiri diatur dalam UU No. 13 Tahun 1968 dimana Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga negara yang tugasnya berdampingan dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter.

Untuk mengurangi defisit neraca berjalan yang semakin meningkat dan menjaga nilai

tukar rupiah terhadap dolar AS stabil. Kebijakan terus dibuat oleh pemerintah pusat, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai lembaga lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah karena peningkatan nilai impor yang signifikan di tahun ini yang menyebabkan adanya defisit neraca perdagangan pada Indonesia. Untuk menghindari hal ini, maka dibuat peraturan meningkatkan pajak penghasilan PPh terhadap barang impor yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan intervensi ganda baik di pasar valuta asing (valas) maupun pemberian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder dengan tujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bentuk intervensi ganda sendiri adalah dengan mengeluarkan cadangan devisa dalam operasi pasar stabilitas rupiah. Bank Indonesia juga menyediakan swap valas dengan tingkat harga yang relatif murah. Swap valas atau transaksi pertukaran dua valas bertujuan untuk mendapatkan kepastian kurs dengan kurs yang bersifat tetap selama kontrak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perdagangan internasional memberikan dampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap negara dengan meningkatkan pendapatan nasional, tingkat produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut data dari lembaga statistik Indonesia, kegiatan ekspor dan impor menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menempati urutan kedua setelah konsumsi privat dan sumbangan. Oleh karena itu, perdagangan internasional menjadi salah satu pilar ekonomi bagi negara Indonesia.

Pentingnya perdagangan internasional juga terlihat dalam kebijakan pemerintah terkait mata uang. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, terutama terhadap Dolar AS. Bank Indonesia, sebagai badan hukum independen, memiliki tugas menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Inflasi tahunan rata-rata selama sembilan tahun terakhir di Indonesia mencapai 4,16%.

Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas mata uang. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam cakupan tugasnya, merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan terkait ekonomi makro, pendapatan negara, dan kerja sama internasional. Sementara itu, Bank Indonesia, sebagai regulator moneter, mendukung upaya pemerintah dengan berperan dalam menstabilkan mata uang Rupiah. Bank Indonesia secara aktif menggunakan kebijakan intervensi ganda, baik di pasar valuta asing (valas) maupun dalam pemberian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder, untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Mulianta Ginting. (2013). Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia. Jakarta
Budiono. (2001). Ekonomi Moneter Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- Abimanyu, Yoopi. (2004). Memahami Kurs Valuta Asing. Jakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No. 06 November
2021
- Astuti, D. (1999). Tanggapan Para Profesional Surabaya Terhadap Perubahan Ekonomi dan
Kebijakan Pemerintah di Bidang Perbankan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*,
1(1), 36-46.
- Kementerian Keuangan. Kinerja Ekspor-Impor Indonesia Catatkan Pertumbuhan yang Cukup
Kuat (2023), diakses pada 02 Desember 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Ekspor-Impor-Indonesia-Cukup-Kuat>
- Permana, Y. H., & Setiawan, S. (2022). Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan
Perekonomian Dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter. *Jurnal Dimamu*,
1(2).
- Pridayanti, A. (2014). Pengaruh ekspor, impor, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia periode 200-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(2)